

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KELURAHAN KARYA MERDEKA KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Shalsabila Aftalitha¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Penelitian ini ditulis oleh Shalsabila Aftalitha (1902036008) Program Studi Pembangunan Sosial, Pembimbing Dra. Lisbet Situmorang., M. Si yang mempunyai Judul Penelitian “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kelurahan Karya Merdeka”. Penelitian ini berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap perekonomian masyarakat. LPM yaitu lembaga kemitraan kelurahan melaksanakan tugasnya agar mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat dan juga alam guna meningkatkan taraf perekonomian dan kemandirian. Peranan adalah tugas seorang atau organisasi secara aktif guna memenuhi tanggungjawab dan fungsinya.

Tujuan studi yang dilaksanakan yaitu guna mengidentifikasi serta melaksanakan deskripsi mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendorong peningkatan perekonomian pada Kelurahan Karya Merdeka, dalam mengidentifikasi serta melaksanakan pendeskripsian faktor yang mendukung serta menghambat LPM untuk mendorong peningkatan perekonomian pada masyarakat Kelurahan Karya Merdeka. Studi yang dilaksanakan mempergunakan teori menurut fungsi serta Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada (Minarni, 2014) yakni, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Motivator, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi Dinamisator. Metode yang dipergunakan yaitu studi deskriptif mempergunakan pendekatan kualitatif.

Hasil studi yang sudah dilaksanakan jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menjalankan fungsi dengan semestinya dan tidak adanya peningkatan ekonomi dengan mengadakan pelatihan teh dan pudding binahong yang menjadi program dari Institut Kesehatan Wiyata Husada Samarinda bekerjasama dengan Kelurahan Karya Merdeka serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karya Merdrka.

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: shalsabilaa9a@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Kata Kunci: *Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Ekonomi*

Pendahuluan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, adapun dalam pembahasan skripsi ini LPM yang ada di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yakni sebuah tempat yang dibuat atas dasar prakarsa masyarakat menjadi mitra pemerintah daerah, bertujuan dalam upaya melaksanakan, merealisasikan keinginan, dan keperluan masyarakat dalam sektor pembangunan daerah guna memberdayakan masyarakat.

Salah satu peran penting dalam negara yakni pemerintah, dimana peran dan misi pemerintah yaitu dalam upaya memajukan pembangunan negara mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial, politik, peningkatan status, budaya dan pembangunan baik di tingkat desa, kabupaten, maupun kota. Proses pembangunan yakni pembangunan negara menuju arah yang lebih baik sesuai dinamika warga negara. Pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah, yang berarti bahwa pemerintah daerah dibiarkan bebas mengurus pemerintahannya sendiri. Sementara dalam yurisdiksinya sendiri ditentukan oleh pemerintah berdasarkan aturannya sendiri.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dimana memberikan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk pemerintah daerah dalam upaya mengatur, mengurus kepentingan pemerintahan daerah, juga kepentingan masyarakat setempat. Adapun tidak terbatas di lingkungan kabupaten saja atau kota, tetapi juga sebagai tugas pedesaan. Kekuasaan desa lebih tepatnya ditetapkan pada pasal 18 dan 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 di BAB XII Bagian 1 Pasal 94(1) dijelaskan bahwa: “Desa memberdayakan kelembagaan masyarakat desa yang ada dalam upaya memudahkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan masyarakat, dan penegakan desa”.

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yakni sebuah institusi sosial yang berada pada tingkat pemerintahan desa, dimana lembaga tersebut berhubungan langsung dengan pekerjaan pembangunan sebagai tugas pokok dan misi LPM. Fungsi dan peran Community Empowerment Organization (CMEs) atau LPM dapat dilihat dari sudut pandang Community Empowerment Organization (CMEs) atau LPM sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator (Juliana, 2014:14). Sedangkan di kelurahan karya merdeka LPM memfasilitasi warga untuk mengadakan pelatihan-pelatihan masyarakat bagaimana membuat teh binahong dan pudding binahong agar ibu-ibu rumah tangga dapat memproduksi teh binahong dan pudding binahong. untuk mengisi waktu kosong dengan harapan dapat mendorong peningkatan perekonomian. Berdasarkan pelatihan-pelatihan yang diberikan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat tetapi, penyelenggaraan sejumlah aktivitas LPM kelurahan karya merdeka tidak

senantiasa berlangsung secara mulus. Hambatan yang sering ditemukan berupa kegiatan minimnya bantuan dana serta keterlibatan masyarakat itu yang sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi serta ditutaskan oleh LPM Kelurahan karya merdeka kecamatan samboja barat.

Tinjauan Pustaka

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan Perekonomian

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto (2012:212), peran yakni bagian dinamis dari suatu jabatan, dan seseorang memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Lembaga

Lembaga menurut Leopard Von Weise dan Brecker dalam (Soekanto, 1990:219), Lembaga yaitu jaringan proses relasi pada manusia serta pada kelompok yang memiliki fungsi melakukan pemeliharaan relasi tersebut dan sejumlah pola yang berdasarkan pada minat urusan seseorang dengan kelompok.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu konsep pembangunan ekonomi berbasis nilai- nilai sosial, yang memiliki tujuan dalam menciptakan model pembangunan baru yang berpusat pada manusia, inklusif, berdaya dan berkelanjutan (Chamber: 1995).

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat dari LPM mempunyai dua pokok makna menurut Emil Salim, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas operasional komunitas Linnaküla dengan melaksanakan berbagai program pengembangan agar komunitas mencapai tingkat kapasitas yang diharapkan;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil keputusan dalam rangka pengembangan pribadi. Kemandirian masyarakat bukan artinya pemerintah membiarkan masyarakat mengalami perkembangan tanpa arah yang jelas, melainkan pemerintah selalu memperhatikan permasalahan dimana dihadapkan masyarakat juga memberikan dukungan serta kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan berkembang dengan bertahap di lingkungannya.

Terdapat juga beberapa fungsi dan peran LPM dapat dilihat melalui sudut pandangnya sebagai fasilitator, mediator, fasilitator dan pemberi energi di wilayah desa (Juliana, 2014:14) sebagai berikut:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator

Peran LPM yang menjadi pelaksana yakni menyediakan beragam kegiatan masyarakat, dimana berkaitan dengan program pembangunan yang dicanangkan juga akan dilaksanakan untuk selanjutnya. selain memberikan layanan pembangunan, LPM juga memberikan dukungan perangkat RT juga RW di Kelurahan. Fungsi LPM

pada tingkat Kelurahan benar-benar dilihat sebagai fasilitator guna perencanaan pembangunan. Organisasi yang memberdayakan masyarakat desa turut melaksanakan inisiatif guna mendorong pembangunan juga berusaha mencari solusi atas masalah yang terdapat di desa.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator

Petugas penggerak masyarakat atau biasa dikenal sebagai mediator ialah bagian dari pemerintah desa dan kabupaten yang keberadaan dan perannya sangat menentukan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dan pembangunan inklusif di tingkat desa dan kabupaten. Tugas utama Kerangka Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah menyebarluaskan hasil rencana pembangunan yang diajukan yang sudah ditentukan dan digunakan sebagai rencana pembangunan tengah jangka dan rencana pembangunan wilayah ke depan untuk semua golongan masyarakat.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator

Motivator atau penggerak inilah yang menjadi aturan dan garda depan pembangunan, sehingga tantangannya yaitu bagaimana melatih para pemimpin pemberdayaan masyarakat. Pemimpin ini bisa tokoh masyarakat atau seluruh petugas pemerintah di tingkat desa, bahkan kabupaten dan kota.

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM memantau dan mencermati berbagai aktivitas masyarakat yang berubah dengan cepat. Berada dalam masyarakat yang berubah secara dinamis dan berada dalam suatu usaha dapat segera merangsang kekuatan masyarakat. Masyarakat lebih terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di setiap daerah tempat tinggalnya. Menyediakan layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dll) terhadap masyarakat pasti saja adalah suatu keharusan. Masyarakat yang swadaya menjadi peserta artinya kebebasan dan kemampuan untuk mengeluarkan potensi diri, menciptakan dan mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menuntaskan persoalan dengan mandiri, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik dalam wilayah nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Proses penguatan dan pemantauan merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan dilihat dari hasil kebijakan tersebut. Tindakan ini akan memicu multi pembacaan dan interpretasi terkait implementasi skema yang diatur. Tindakan ini lebih tentang memuaskan keperluan informasi. Pengawasan dibutuhkan dalam melakukan penyesuaian rencana serta format pembangunan sekaligus meminimalkan pengaruh negatif yang berkemungkinan terjadi.

Metode Penelitian

Pada penyusunan studi yang dilaksanakan menggunakan studi kualitatif dengan prosedur studi yang mendapatkan data deskriptif berwujud uraian kata-kata dan perilaku yang diobservasi atau dan dianalisis lebih lanjut mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk Meningkatkan Perekonomian di Kelurahan Karya Merdeka. Dalam studi yang dilaksanakan penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber informasi yang mengetahui individu lain yang berperan sebagai sumber informasi, pada studi yang dilaksanakan sumber informasi yaitu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan karya Merdeka, lurah karya merdeka, dan masyarakat kelurahan karya merdeka. Sedangkan, data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian berdasarkan berbagai sumber data yang ada guna menambahkan informasi kunci yang telah diperoleh sebelumnya dari studi pustaka, studi literatur, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data di pada studi yang dilaksanakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang dipergunakan yaitu indeks data, klarifikasi data, penyajian data, dan interpretasi data.

Hasil Penelitian

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perekonomian Di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat

Peran dari Lembaga pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karya Merdeka dilihat dari beberapa indikator berdasarkan peran dan fungsinya yaitu Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator untuk perekonomian di Kelurahan Karya Merdeka.

1. Lembaga Pemberdayan Masyarkat Sebagai Fasilitator

Memfasilitasi segala aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan program lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat memfasilitasi masyarakat terkait program kerja LPM, di dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat berperan dalam kegiatan yang di adakan LPM dan juga partisipasi masyarakat

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mediator

Mensosialisasikan hasil-hasil dari pelatihan atau kegiatan kepada masyarakat, pelaksanaan mensosialisasikan kegitan yang ada diadakan LPM.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Motivator

Kader LPM penggagas dan pelopor dan juga memberi semangat kepada masyarakat agar kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi di setiap kegiatan dan pelaksanaan tugas individu.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Dinamisator

Pemantauan dan pengawasan pada kegiatan di Masyarakat dan menempatkan dirinya di tengah masyarakat agar mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Karya Merdeka

1. Faktor Pendukung

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hasil observasi lapangan pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kelurahan Karya Merdeka merujuk pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bertempat tinggal di kelurahan dalam mendukung peningkatan ekonomi. Partisipasi dalam kegiatan peningkatan ekonomi menunjukkan sejauh mana Masyarakat terlibat dalam meningkatkan kondisi di Kelurahan Karya Merdeka. Terdapat juga upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan juga dapat meningkatkan kapasitas SDM di tingkat kelurahan yaitu:

Pemerintah Kelurahan:

1. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat
2. Pemantauan dan Evaluasi Program

2. Faktor Penghambat

Terbatasnya daun Binahong

Daun Binahong tidak banyak di tanam oleh Masyarakat di Kelurahan Karya Merdeka. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa faktor dana menjadi salah satu penyebab tidak terselenggaranya dan berkelanjutannya pelatihan membuat teh binahong dan pudding binahong

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan 12 narasumber di lembaga pemberdayaan masyarakat adalah ketua LPM, Lurah Kelurahan Karya Merdeka, masyarakat kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat.

Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi program pemberdayaan di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara dan turun langsung ke lapangan dalam meningkatkan perekonomian. Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian dengan mengadakan pelatihan pembuatan teh dan pudding binahong dengan bekerja sama dengan institut wiyata husada, pelatihan pembuatan teh dan pudding binahong ini program kerja institut wiyata husada bekerja sama dengan

lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat dan Kelurahan Karya Merdeka. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat berharap pelatihan pembuatan teh dan pudding binahong dapat memberdayakan warga Kelurahan Karya Merdeka sehingga meningkatkan perkonomian.

Pelatihan teh dan pudding binahong dengan bertujuan menambah pengetahuan dan menambah keterampilan agar kedepannya menjadi Partisipasi masyarakat saat pelatihan pembuatan teh dan pudding binahong banyak yang tidak hadir dikarenakan kesibukkan ibu-ibu dan sulitnya membagi waktu antara pekerjaan rumah, seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, memasak, membersihkan rumah, menjaga warung kecil-kecilan, bapak-bapak berkebun dan mengarit rumput, dan warga beranggapan yang datang di pelatihan teh dan pudding binahong lebih mampu mengerti dibandingkan dirinya sendiri.

Petugas penggerak masyarakat mensosialisasikan kegiatan yang diadakan lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan dengan baik di lihat dengan memberitahukan dan mengundang warga Kelurahan Karya Merdeka melalui group chat whatsapp rukun tetangga bahwa akan dilaksanakannya pelatihan pembuatan teh dan pudding binahong.

Kader lembaga pemberdayaan masyarakat memberi semangat kepada warga agar datang pada kegiatan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat tetapi yang ditemukan di lapangan dan wawancara kader lembaga pemberdayaan tidak melakukan pemberi semangat kepada warga.

Pengawasan dan evaluasi pada kegiatan yang diadakan lembaga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan, ditemukan di lapangan dan hasil waawancara, kader lembaga pemberdayaan masyarakat tidak melakukan evaluasi ketika kegiatan yang diadakan seperti pelatihan pembuatan teh dan pudding binahong dan melakukan pengawasan ketika pertama kali di adakannya pelatihan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan lembaga pemberdayaan masyarakat melaksanakan pelatihan membuat teh dan pudding binahong yang pada masyarakat namun di lapangan partisipasi masyarakat kurang atau tidak banyak yang datang dengan kata lain partisipasi masyarakat kurang dikarenakan kesibukkan warga khususnya ibu-ibu melakukan pekerjaan rumah, mengantar ke sekolah dan bapak-bapak bekerja di kebun. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memfasilitasi adalah mengadakan pelatihan teh dan pudding binahong bekerja sama dengan institut kesehatan wiyata husada,

mensosialisasikan informasi terkait pelatihan membuat teh dan pudding binahong di kelurahan dengan membagikan undangan pembuatan teh dan pudding binahong di kirim melalui grup whatsapps seluruh rukun tetangga yang berada di Kelurahan Karya Merdeka.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang baik dalam perannya sebagai pemberi semangat, tetapi masih rendah dan kurangnya perhatian masyarakat mengikuti kegiatan peningkatan ekonomi dan ditemukan di lapangan melihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terkaitnya perannya sebagai dinamisator kader LPM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan Lurah Karya Merdeka yang mengatakan bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakat yang berhak menanggapi bagaimana baik atau tidaknya sebab masyarakat langsung memanfaatkan hasil kegiatan peningkatan ekonomi.

Saran

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program yang diinisiasi oleh LPM. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendekatan komunikasi yang efektif, dan pengenalan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota atau kader LPM melalui pelatihan dan pembelajaran yang relevan. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memfasilitasi, mediasi, dan memberikan dukungan kepada masyarakat, dan juga LPM sebaiknya menjalin kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor lingkungan. Kolaborasi ini dapat memperluas sumber daya yang tersedia dan memperkaya program-program yang ditawarkan oleh LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus memastikan bahwa informasi terkini dan relevan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Ini termasuk informasi tentang program pemberdayaan masyarakat, sumber daya yang tersedia dan berbagai layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlu mendorong dan mendukung inisiatif-inisiatif baru dari masyarakat serta memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam memecahkan masalah-masalah lokal.

Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, lembaga pemberdayaan masyarakat dapat mengidentifikasi keberhasilan, memperbaiki kelemahan, dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Chamber, R. (1995). *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Naskah No.20 Juni-Juli
- Juliana. (2014). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Kota*. e-Journal. Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
- Sarinah. (2009). *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish.
- Sholahudin, Muhammad. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sondang P. Siagan. (2007). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto. (2005). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto. (2012). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto., Soejono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat, tidak hanya dalam lingkup provinsi, kabupaten atau ota dan kecamatan melainkan tugas pedesaaan.

Widjaja, W. (2002). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.